

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRACT / INTISARI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan Penelitian.....	22
D. Manfaat Penelitian.....	23
E. Keaslian Penelitian.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Umum tentang Pidana Tambahan Perampasan	29
B. Tinjauan Umum tentang Badan Hukum dan Kaitannya dengan Perusahaan Milik Terpidana	32
C. Asas-Asas Pemisahan Entitas Hukum (<i>Separate Legal Entity</i>) dan Teori <i>Piercing of The Corporate Veil</i> pada Perseroan Terbatas	40

D. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana dalam bentuk Perampasan Perusahaan Milik Terpidana yang Menjadi Tempat Terjadinya Tindak Pidana	42
E. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas dalam Peradilan Pidana .	45
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Sifat dan Bentuk Penelitian.....	51
C. Sumber Data.....	53
D. Cara dan Alat Penelitian	57
E. Analisis Data Penelitian.....	59
F. Jalannya Penelitian	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Pidana Tambahan Perampasan Perseroan Terbatas Milik Terpidana Perorangan Ditinjau dari Asas Pemisahan Entitas Hukum (<i>Separate Legal Entity</i>)	64
1. Perampasan Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas sebagai Pidana Tambahan terhadap Terpidana Korupsi Orang Perseorangan	64
2. Pemenuhan Unsur Kepemilikan Terpidana atas Perseroan Terbatas ditinjau dari Asas Pemisahan Entitas Hukum (<i>Separate Legal Entity</i>)	

3. Contoh Kasus Perampasan Perusahaan Milik Terpidana sebagai Tempat Terjadinya Tindak Pidana Korupsi.....	84
B. Konsep Pengaturan Pidana Tambahan Perampasan Terhadap Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas Dengan Terpidana sebagai Pemegang Saham dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Masa Mendatang	90
1. Permasalahan dalam Pengaturan Pidana Tambahan Perampasan terhadap Perusahaan milik Terpidana berbentuk Perseroan Terbatas.....	91
2. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Tindak Pidana Korupsi dan Perseroan Terbatas	93
3. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perseroan Terbatas Sebagai Alternatif Pelaksanaan Perampasan Perusahaan	99
4. Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas Oleh Jaksa Kepada Pengadilan Sebagai Alternatif Perampasan Perusahaan Milik Terpidana Korupsi.....	110
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117